

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nomenklatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga. Sebelumnya nomenklatur nya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam perspektif pembangunan, terdapat periodisasi perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang (20 tahunan) yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), perencanaan jangka menengah (5 tahunan) yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan penjabaran perencanaan (5 tahunan) yang ada di SKPD dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) dan perencanaan jangka pendek (tahunan) yang ada di SKPD dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja. Rencana Kerja Dinpermasdes merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional dibandingkan dengan dokumen Renstra.

Komponen-komponen yang terkandung dalam Renja 2018 meliputi sasaran strategis dan sasaran program yang akan dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan. Pada dasarnya Renja tahun 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2018. Target kinerja mempresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai selama tahun 2018 dan semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 mengacu pada arah kebijakan RKPD dan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021 dan juga didasarkan pada antisipasi

terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi, masukan berbagai stakeholder dan dinamika perkembangan pembangunan terutama di lingkungan strategis pedesaan serta sinkronisasi Program dan Kegiatan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja yang dilaksanakan Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Purbalingga.

1.2. Landasan Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *tentang* perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130)
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 06);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;
 13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015.
 14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 110 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016.
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 merupakan Program dan Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketepatan strategi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi. Pembuatan Rencana Kerja ini mempunyai maksud :

- Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugasnya sehingga sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan keuangan daerah dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam APBD tahun 2018.
- Sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan program kegiatan, sekaligus sebagai tolak ukur di setiap bidang pada Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2018.

b. Tujuan

Penyusunan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2018 mempunyai tujuan :

1. Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga yang termuat dalam RPJMD tahun 2016 - 2021 terutama di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Menjabarkan rencana strategis ke rencana operasional
3. Sebagai instrumen untuk mengukur capaian target kinerja penyelenggaraan kegiatan pada Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMASDES TAHUN 2017.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinpermasdes Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinpermasdes.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinpermasdes
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinpermasdes.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinpermasdes
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dan waktu yang ditentukan dalam upaya melaksanakan seluruh program dan kegiatan tersebut. Secara umum capaian kinerja program dan kegiatan Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga tahun 2017 dapat dilaksanakan dan mendekati target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2017 Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga mengelola APBD sebesar Rp. 5.048.135.000,- yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 2.938.909.000,-
- Belanja Langsung Rp. 2.109.226.000,-

Dengan realisasi sebesar Rp. 3.587.079.739,- atau 71,06 % yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 2.454.991.944,-
- Belanja Langsung Rp. 1.132,087.795,-

Realisasi belanja tidak langsung merupakan pengeluaran untuk membayar belanja pegawai yang meliputi belanja gaji dan tunjangan serta pembayaran tambahan penghasilan bagi 32 PNS di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan belanja langsung dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan yang meliputi 3 program dan 30 kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017. Disamping melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten yang pengelolaannya menjadi tupoksi Dinpermasdes, juga melaksanakan fasilitasi dana bantuan untuk desa yang pendanaanya bersumber dari dana Dana Hibah dan Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dana APBN.

Alokasi dana Hibah dari APBD Kabupaten Purbalingga tahun 2017 adalah sebesar Rp. 600.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 600.000.000,- atau 100%. Dana hibah ini merupakan Hibah kepada KODIM 0702 Purbalingga yang

digunakan untuk pelaksanaan TMMD dengan lokasi di desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol.

Alokasi dana bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten Purbalingga kepada desa sebesar Rp. 99.429.519.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.385.119.000,- atau sebesar 99,01 %. Dana bantuan keuangan kepada desa ini dipergunakan untuk membiayai 4 paket kegiatan yang meliputi Alokasi dana desa, bantuan lokasi TMMD, Pendampingan TMMD dan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa.

Alokasi dana bantuan keuangan kepada desa dari pemerintah provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 10.214.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.214.000.000,- atau 100 %. Dana bantuan keuangan provinsi ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan TMMD Sengkuyung Rp. 374.400.000,-, Ketahanan Masyarakat Desa Rp. 6.720.000.000,-, Operasional KPMD Rp. 1.120.000.000,-, Rintisan model desa Berdikari Rp. 100.000.000,- dan Bantuan sarana dan prasarana lingkungan Rp. 1.900.000.000,-

Alokasi bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp. 191.224.910.000,- dengan realisasi Rp. 191.224.910.000,- atau 100 %. Dana ini merupakan alokasi dana desa bagi 224 desa yang ada di kabupaten Purbalingga.

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan baik dari anggaran APBD Kabupaten, Bantuan Kabupaten, Bantuan Provinsi dan APBN sebagaimana tersebut diatas terdapat beberapa indikator kinerja yang telah sesuai dengan target yang telah ditentukan, akan tetapi juga terdapat pula beberapa indikator yang belum dapat terukur secara pasti karena dilihat dari segi kemanfaatan dan dampak dari masing-masing kegiatan hanya dapat dilihat dalam jangka waktu yang panjang.

Adapun Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga s/d tahun 2017 dapat disajikan sebagaimana tabel TC 29 sebagai berikut :

TABEL TC - 29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga**

RENJA TAHUN 2018

Nama Perangkat Daerah : DINPEERMASDES

RENJA 2018

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan							
			Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 s/d 2021 5 tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2015	Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2016	Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)	Target Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2017	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 11=(10/4)						
			1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
2	07	01	01	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1	Prosentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	85	prosen	75	85	75	88.24	76	75.33	88.63	
					2	Rata rata capaian SKP	80	prosen	74	78	75	96.15	76	75.00	93.75	
					3	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.5	prosen	74	78	77.96	99.95	78	76.65	95.22	
07	01	01	01	Penyediaan bahan dan jasa perkantoran		Honorarium	150	orang	0	orang	30	28	93.33	30	58	38.67
						Belanja Barang Habis Pakai	60	bulan	0	bulan	12	12	100	12	24	40.00
						Belanja Jasa Kantor	60	bulan	0	bulan	12	12	100	12	24	40.00
07	01	01	02	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		Perjalanan DD	1150	OH	0	OH	230	224	97.39	230	454	39.48
						Perjalanan LD	500	OH	0	OH	100	90	90	100	190	38.00
07	01	01	03	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		Pemel Gedung	5	unit/kali	0	unit/kali	1	1	100	1	2	40.00
						Pemel Kendaraan	75	unit/kali	0	unit/kali	15	15	100.00	15	30	40.00
						Pemel Alat kantor	75	unit/kali	0	unit/kali	15	14	93.33	15	29	38.67
						Pemel alat mebelair	75	unit/kali	0	unit/kali	15	14	93.33	15	29	38.67
						Pemel Alat kantor	75	unit/kali	0	unit/kali	15	16	106.67	15	31	41.33
07	01	01	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		Tercukupinya sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan	75	unit	0	unit	15	14	93.33	13	27	36.00
07	01	01	07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		Terlaksananya Diklat Teknis	30	orang/kali	0	orang/kali	6	5	83.33	6	11	36.67
						Pelayanan Prima										
07	01	01	08	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD		Tersusunnya Buku Renstra	125	buku		buku	25	24	96	25	49	39.20
						Dinpermasdes Kab. Purbalingga										

2	07	01	15	Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa	1 Cakupan desa yg melaksanakan musrenbangdes tepat waktu	224 desa	desa	224	224	100	224	224	100.00
					2 Cakupan desa/kel yg menyusun profil desa tepat waktu	239 desa/kel	desa/kel	239	239	100	239	239	100.00
					3 Cakupan desa yang memiliki Bumdes yg sehat	90 desa	desa	18	56	311.11	18	74	82.22
					4 Rasio lembaga RT yg aktif	5081 unit	unit	5081	5081	100	5081	5081	100.00
					5 Jumlah pasar desa yg dibina	94 pasar	pasar	10	24	240.00	10	34	36.17
					6 Cakupan desa yg menyusun doku men perencanaan dan penganggaran tepat waktu	224 desa	desa	224	224	100	224	224	100.00
07	01	15	01	Fasilitasi DD dan ADD	Terlaksananya Fasilitasi ADD dan DD	224 desa	desa	224	224	100	224	224	100.00
07	01	15	02	Diklat Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Diklat Kepala Desa Baru	224 desa	desa	224	224	100	224	224	100.00
07	01	15	03	Fasilitasi dan Pembinaan BUMDES	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas Pelaku BUMDes	90 Bumdes	Bumdes	18	18	100.00	18	36	40.00
07	01	15	04	Pemanfaatan dan Pengenalan TTG	Termanfaatkannya TTG Sederhana Bagi Masyarakat	50 klpk/kec	klpk/kec	4	4	100	4	8	16.00
07	01	15	05	Fasilitasi TMMD	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan TMMD di desa	20 desa	desa	3	3	100.00	6	9	45.00
07	01	15	06	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Terlaksananya Bintek bagi Aparat Pemerintah Desa dan Sosialisasi bagi Anggota BPD	224 desa	desa	224	224	100	224	224	100.00
07	01	15	07	Pelatihan Sistem Keuangan Desa	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Keuangan di Desa	224 desa	desa	224	224	100	224	224	100.00
07	01	15	08	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Evaluasi pemberdayaan Masyarakat Desa	15 desa	desa	3	3	100	3	6	40.00
07	01	15	09	Fasilitasi Pokjnal Posyandu	Meningkatnya Kinerja Pokjnal Posyandu Kab dan Posyandu Desa/Kel	239 desa/kel	desa/kel	239	239	100	239	239	100.00
07	01	15	10	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Desa	Tersusunnya Dokumen RKP Desa Tahun 2018	224 desa	desa	224	224	100	224	224	100.00
07	01	15	11	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan	16 desa	desa	4	5	125	0	5	31.25
07	01	15	12	Bupati Tilik Desa (mulai 2017)	Terlaksananya Kegiatan Bupati Tilik Desa	20 desa	desa	0	0	0	6	6	30.00
07	01	15	13	Fasilitasi Laboratorium lapang Desa (Labsite)	Terlaksananya Pembinaan Desa Replikasi Labsite	15 desa	desa	3	3	100	3	6	40.00
07	01	15	14	Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus dan bantuan gubernur	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus	224 desa	desa	224	224	100	224	224	100.00
07	01	15	15	Penyusunan Laporan Profil Desa se Kab.Purbalingga	Terkoordinasikannya Penyusunan Profil Desa	224 desa	desa	224	224	100	224	224	100.00
07	01	15	16	Fasilitasi Kerjasama antar Desa (mulai 2018)	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama antar Desa	18 Desa	Desa	0	0	0	0	0	0.00

07	01	15	17	Pelatihan Lembaga kemasyarakatan (LKMD/LKMK, RT/RW dan LK lainnya)	Terealisasinya Tugas dan Fungsi LKMD/LKMK	224 orang	orang	104	104	120	104	208	92.86
07	01	15	18	Penyusunan Perbup Tindak Lanjut Implementasi UU Desa	Tersusunnya Peraturan Bupati	7 perbub	perbub	1	2	200	1	3	42.86
2	07	01	16	Program Kelembagaan Masyarakat Desa	1 Cakupan Posyandu aktif	1194 unit	unit	1194	1194	100	1194	1213	101.59
					2 Cakupan lumbung desa yang aktif	130 unit	unit	20	20	100	72	64	49.23
					3 Rasio Karang Taruna Aktif	239 desa/ke.	desa/ke.	239	239	100	239	239	100.00
					4 Rasio PKK Desa/Kelurahan yang aktif	239 desa/ke.	desa/ke.	239	239	100	239	239	100.00
					5 Cakupan BP SPAM aktif	110 klpk	klpk	50	60	120	50	120	109.09
					6 Cakupan KPP Sanitasi Lingkungan aktif	60 klpk	klpk	60	60	100	60	60	100.00
07	01	16	01	Gebrak Gotong Royong Masyarakat dan Bulkan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Terwujudnya Semangat Gotong Royong Masyarakat	224 desa	desa	224	224	100	224	224	100.00
07	01	16	02	Fasilitasi LEM dan Sarana prasarana lingkungan	Terfasilitasinya Keg LEM dan Penataan Sarpras lingkungan Pengelolaan BP SPAMS dan Pengelola IPAL Komunal di Desa Lokasi	110 klpk	Klpk/kali	30	20	66.7	22	42	38.18
07	01	16	03	Sistem Informasi Desa (SID)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Informasi Desa	224 Desa	Desa	224	224	100	224	224	100.00
07	01	16	04	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi KPMD Bagi Desa	224 Desa	Desa	0	0	0	0	224	100.00
07	01	16	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender (P2MBG)	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Bantuan Peralatan	500 orang	orang	100	100	100	80	180	36.00
07	01	16	06	Pembinaan Kelembagaan Pengelolaan Pasar Desa	Terlatihnya Pengelola Pasar Desa	94 pasar/kali	pasar	34	34	100	34	68	72.34
07	01	16	07	Revitalisasi Kelembagaan Lumbung Desa	Terwujudnya Revitalisasi Lumbung Desa	60 unit	unit	60	60	100	60	120	200.00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga yang berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan melalui Perjanjian Kinerja yang telah dibuat bersama, serta rencana capaian IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan isian amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga yang meliputi 12 indikator program sebagai berikut :

- A. Indikator Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa, meliputi :
 - 1. Capaian desa yang melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu.
 - 2. Cakupan desa yang menyusun profil desa secara tepat waktu.
 - 3. Cakupan desa yang memiliki BUMDes yang sehat.
 - 4. Rasio lembaga Rukun Tetangga (RT) yang aktif.
 - 5. Jumlah pasar desa yang dibina
 - 6. Cakupan desa yang menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu.
- B. Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat, meliputi :
 - 7. Cakupan posyandu aktif
 - 8. Cakupan lumbung desa sehat
 - 9. Cakupan Karang Taruna aktif
 - 10. Rasio PKK Desa/Kelurahan aktif
 - 11. Cakupan BP SPAMS aktif
 - 12. Cakupan KPP sanitasi aktif.

Adapun data lengkap pencapaian indikator kinerja program sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga dan dalam Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016 – 2021 sampai dengan tahun 2017 dapat disajikan sebagaimana tabel *T.C. 30* sebagai berikut :

Tabel T.C.30															
Pencapaian Kinerja Pelayanan DINPERMASDES															
Kabupaten Purbalingga															
RENJA 2018															
No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target		Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		CAPIAN	Catatan Analisa
				RPJMD	2016 - 2021	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	SD 2016 (%)	
						2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A	Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa														
1	Cakupan desa yang melaksanakan musrenbangdes tepat waktu	-	-	224 desa	desa	224	224	224	224	224	224	224	224	100	
2	Cakupan desa yang menyusun profil desa secara tepat waktu	-	-	224 desa	desa	224	224	224	224	197	224	224	224	88	
3	Cakupan desa yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran tepat waktu	-	-	224 desa	desa	224	224	224	224	224	224	224	224	100	
4	Cakupan desa yang memiliki BUMDes yang sehat	-	-	90 desa	desa	18	18	18	18	18	18	18	18	20	Tahun 2018 diperkirakan tambah 10
5	Rasio lembaga Rukun Tetangga (RT) yang aktif	-	-	5081 RT	RT	5081	5081	5081	5081	5081	5081	5081	5081	100	
6	Jumlah pasar desa yang dibina	-	-	94 Pasar	Pasar	44	54	64	74	34	34	34	36	36	Tahun 2018 diperkirakan tambah 1
B	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa														
1	Cakupan Posyandu aktif	-	-	1,194 Unit	Unit	1,194	1,194	1,194	1,194	1,194	1,194	1,213	1,213	100	Tahun 2018 diproyeksikan tambah 19
2	Cakupan lumbung desa sehat	-	-	60 Unit	Unit	12	12	12	12	12	12	12	12	20	
3	Rasio Karang Taruna aktif	-	-	239 Desa/Kel	Desa/Kel	239	239	239	239	239	239	239	239	100	
4	Rasio PKK Desa/Kelurahan aktif	-	-	239 Desa/Kel	Desa/Kel	239	239	239	239	239	239	239	239	100	
5	Cakupan BP-SPAMS aktif	-	-	50 klpk	klpk	10	10	10	10	10	10	80	30	20	Tahun 2018 diproyeksikan tambah 30
6	Cakupan KPP Sanitasi Lingkungan aktif	-	-	60 klpk	klpk	60	60	60	60	60	60	60	60	100	Tahun 2018 diproyeksikan tetap

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

a) Tingkat kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.

Dalam rangka pelayanan kinerja Dinpermasdes pada Renja Tahun 2018, didukung dengan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga meliputi :

1. Kepala Dinas	1 orang
2. Sekretaris Dinas	1 orang
3. Kasubag Pelayanan OPD	2 orang
4. Kepala Bidang Teknis	3 orang
5. Kepala seksi teknis	6 orang
6. JFU / Staf	19 orang

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya koordinasi OPD dalam hal pelaksanaan Program dan kegiatan lintas sektoral sehingga sasaran dan program yang dibuat kurang optimal.
2. Masih kurangnya fasilitas kerja sehingga pekerjaan kadang terlambat dan tidak bisa tepat waktu
3. Belum memadainya Sumber Daya Manusia Aparatur Dinpermasdes baik secara kualitas maupun kuantitas.
4. Masih terbatasnya dana untuk melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam pencapaian target program dan target kegiatan yang telah direncanakan,

Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi :

1. Koordinasi yang masih belum maksimal sehingga menghambat dalam proses pelayanan
2. Tingkat pemahaman aparatur dalam pelaksanaan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal
3. Inovasi dan kreatifitas aparatur perlu ditingkatkan
4. Kapasitas pegawai yang kurang memadai dan penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya
5. Kepedulian terhadap tugas dan tanggung yang belum terwujud dengan baik.

Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah :

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa
2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana di desa
3. Peningkatan Kemandirian Masyarakat desa
4. Peningkatan Lembaga dan organisasi yang ada di desa
5. Peningkatan Badan Usaha Milik Desa
6. Peningkatan Sumber daya aparatur di desa
7. Peningkatan inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG)

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan perangkat daerah :

Tantangan :

Dengan adanya peraturan Bupati Nomor 88 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga yang sebelumnya adalah Bapermasdes maka struktur organisasi perangkat daerah mengalami perubahan. Hal ini semakin memacu semangat seluruh pejabat dan staf Dinpermasdes kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program dan kegiatan serta dalam pencapaian target yang telah direncanakan.

Peluang :

1. Adanya ketentuan regulasi atau peraturan yang baru sebagai dasar pelaksanaan operasional kegiatan.
2. Adanya kebijakan baru terutama pada visi dan misi bupati yang terpilih
3. Adanya dukungan pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten purbalingga
4. Adanya kemajuan teknologi dan informasi yang ada di desa

Isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA 2018 :

1. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa
2. Adanya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
3. Masih ada desa yang belum membentuk BUMDES
4. Adanya pendamping desa
5. Adanya kekosongan jabatan perangkat desa.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga, RPJMD Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem pembangunan nasional. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan RENSTRA SKPD dan RKPD setiap tahunnya.

Dalam penyusunan RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara patrisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan.

Namun demikian tentu masih terdapat berbagai hal yang perlu ditindaklanjuti dengan menyesuaikan beberapa hal yang berkembang selama periode berikutnya, Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2018 harus senantiasa berpedoman pada RENSTRA Dinpermasdes kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021 guna menghasilkan rumusan strategi yang terarah, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang sudah ditetapkan dan menjadi rencana prioritas pembangunan pemerintah kabupaten Purbalingga tahun 2018 dalam urusan wajib non pelayanan dasar dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat disajikan dalam *tabel T.C. 31* sebagai berikut :

Tabel T.C.31											
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN PURBALINGGA											
Renja 2018											
Nama Perangkat Daerah : DINPERMASDES											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah				642,058,000	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah				681,558,000	
	Penyediaan bahan dan Jasa Perkantoran	Purbalingga	Tersedianya honor, barang habis pakai dan jasa perkantoran	31 Pegawai	218,660,000	Penyediaan bahan dan Jasa Perkantoran	Purbalingga	Tersedianya honor, barang habis pakai dan jasa perkantoran	31 Pegawai	233,660,000	Untuk Operator SIMDA dan Penambahan Jaga Malam
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Purbalingga	Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	31 Pegawai	122,500,000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Purbalingga	Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	31 Pegawai	147,000,000	Pada Tahun 2017 dalam Anggaran Perubahan ada Penambahan krn pada bulan Juni 2017 sudah habis
	Pemeliharaan sarana dan Prasarana kantor	Purbalingga	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	1paket/Thn	207,167,000	Pemeliharaan sarana dan Prasarana kantor	Purbalingga	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	1paket/Thn	205,167,000	Kantor baru tetapi bukan bangunan baru sehingga perlu berbagai pemeliharaan sarpras
	Pengadaan sarana dan Prasarana kantor	Purbalingga	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	1paket/Thn	70,731,000	Pengadaan sarana dan Prasarana kantor	Purbalingga	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	1paket/Thn	70,731,000	Kendaraan Roda 2 untuk Pejabat Struktural 3 Unit Rak Arsip 4 buah untuk 3 bidang dan 1 Sekretariat
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Purbalingga	Terlaksananya Diklat Teknis Pelayanan Prima	31 Pegawai	15,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Purbalingga	Terlaksananya Diklat Teknis Pelayanan Prima	31 Pegawai	15,000,000	Menyesuaikan Kebutuhan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Purbalingga	Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja	5 Laporan	8,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Purbalingga	Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja	5 Laporan	10,000,000	Dokumen LKD, LKPJ, Lakip

2	Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa				1,547,723,000	Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa				2,124,517,000	
	Fasilitasi DD dan ADD	Purbalingga	Meningkatnya kelancaran Pengelolaan ADD dan DD	224 Desa	165,000,000	Fasilitasi DD dan ADD	Purbalingga	Meningkatnya kelancaran Pengelolaan ADD dan DD	224 Desa	165,000,000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat ADD dan DD Sosialisasi ADD dan DD, Bintek
	Diklat Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa	Purbalingga	Meningkatnya Manajemen Administrasi Desa	50 desa	240,206,000	Diklat Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa	Purbalingga	Meningkatnya Manajemen Administrasi Desa	50 desa	689,000,000	Penyesuaian Harga Satuan Penambahan biaya perjalanan Dinas dalam dan luar Daerah dan biaya penggandaan
	Fasilitasi dan Pembinaan BUMDES	Purbalingga	Terbinanya BUMDes di Kabupaten Purbalingga	50 unit	200,000,000	Fasilitasi dan Pembinaan BUMDES	Purbalingga	Terbinanya BUMDes di Kabupaten Purbalingga	50 unit	200,000,000	Adanya kenaikan Target Kinerja
	Pemanfaatan dan Pengenalan TTG	Purbalingga	Termanfaatannya TTG bagi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	3 kelompok	120,000,000	Pemanfaatan dan Pengenalan TTG	Purbalingga	Termanfaatannya TTG bagi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	3 kelompok	120,000,000	Adanya Kenaikan Target Kinerja
	Fasilitasi TMMD	Purbalingga	Meningkatnya Kelancaran TMMD di Desa Lokasi	4 Desa	120,000,000	Fasilitasi TMMD	Purbalingga	Meningkatnya Kelancaran TMMD di Desa Lokasi	4 Desa	120,000,000	Adanya Target kinerja tidak berubah
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Purbalingga	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	224 Desa	100,000,000	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Purbalingga	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	224 Desa	100,000,000	Penyesuaian Harga satuan Penambahan biaya sewa Gedung Penambahan biaya Perjalanan dan uang saku Peserta
	Fasilitasi Sistem Keuangan Desa	Purbalingga	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	224 Desa	100,000,000	Fasilitasi Sistem Keuangan Desa	Purbalingga	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	224 Desa	100,000,000	Akomodasi dari BPKP, Makan minum rapat, SPPD Dalam dan luar Daerah, menyesuaikan indek, sewa gedung dan Honorarium Satgas SISKUDES
	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Purbalingga	Terlaksananya Evaluasi pemberdayaan Masyarakat Desa	3 desa	80,000,000	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Purbalingga	Terlaksananya Evaluasi pemberdayaan Masyarakat Desa	3 desa	80,000,000	Penambahan Hadiah bagi Pemenang Perlombaan Desa/Kel
	Fasilitasi Pokjnal Posyandu	Purbalingga	Terlaksananya Fasilitasi Pokjnal Posyandu	239 ds/kel	62,000,000	Fasilitasi Pokjnal Posyandu	Purbalingga	Terlaksananya Fasilitasi Pokjnal Posyandu	239 ds/kel	80,000,000	Pembinaan Pengurus Posyandu Se Kabupaten Purbalingga
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Desa	Purbalingga	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan Desa	224 Desa	55,000,000	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Desa	Purbalingga	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan Desa	224 Desa	55,000,000	Menambah Jumlah peserta Sosialisasi Musrenbang, SPPD, penyesuaian Indek dan sewa gedung
	Fasilitasi Pengembangan Kawasan perdesaan	Purbalingga	Tersusunnya dokumen pengembangan Kawasan	2 Kawasan	50,000,000	Fasilitasi Pengembangan Kawasan perdesaan	Purbalingga	Tersusunnya dokumen pengembangan Kawasan	2 Kawasan	50,000,000	Adanya kenaikan Target Kinerja

	Bupati Tilik Desa	Purbalingga	Terkordinasinya Pemda Kab dengan Pemdes	6 desa	42,000,000	Bupati Tilik Desa	Purbalingga	Terkordinasinya Pemda Kab dengan Pemdes	6 desa	42,000,000	Orientasi Lapangan, Rapat Koord, dan Monitoring
	Fasilitasi Laboratorium lapang Desa (Labsite)	Purbalingga	Terlaksananya Kegiatan di Desa Replikasi Labsite	3 Desa	40,000,000	Fasilitasi Laboratorium lapang Desa (Labsite)	Purbalingga	Terlaksananya Kegiatan di Desa Replikasi Labsite	3 Desa	40,000,000	Monitoring dan Rakor
	Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus	Purbalingga	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan Pemdes	50 Desa	30,000,000	Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus	Purbalingga	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan Pemdes	45 Desa	70,000,000	Rapat Konsultasi dan Monev
	Penyusunan Laporan Profil Desa se Kab.Purbalingga	Purbalingga	Tersusunnya Laporan Profil Desa se Kab.Purbalingga	224 ds, 15 Kel	27,925,000	Penyusunan Laporan Profil Desa se Kab.Purbalingga	Purbalingga	Tersusunnya Laporan Profil Desa se Kab.Purbalingga	224 ds, 15 Kel	27,925,000	Penyesuaian Harga satuan, Penambahan biaya sewa Gedung
	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Purbalingga	Meningkatnya Kerjasama antar Desa	18 kec	25,000,000	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Purbalingga	Meningkatnya Kerjasama antar Desa	18 kec	40,000,000	Rapat Konsultasi dan Monev
	Pembinaan Kelembagaan RT/RW	Purbalingga	Peningkatan kapasitas kelembagaan RT/RW	120 orang	20,592,000	Pembinaan Kelembagaan RT/RW	Purbalingga	Peningkatan kapasitas kelembagaan RT/RW	120 orang	20,592,000	Pendataan RT, Pembinaan RT se Kabupaten
	Pembinaan Kelembagaan PKK	Purbalingga	Peningkatan kapasitas kelembagaan PKK	0	-	Pembinaan Kelembagaan PKK	Purbalingga	Peningkatan kapasitas kelembagaan PKK	224 Desa	40,000,000	Pendataan dan pembinaan kelembagaan PKK
	Pembinaan Kelembagaan Karang Taruna	Purbalingga	Peningkatan kapasitas kelembagaan Karang Taruna	0	25,000,000	Pembinaan Kelembagaan Karang Taruna	Purbalingga	Peningkatan kapasitas kelembagaan Karang Taruna	224 Desa	40,000,000	Pendataan dan pembinaan kelembagaan Karang Taruna
	Pembinaan Pengelolaan Kelembagaan IPAL Komunal	Purbalingga	Peningkatan kapasitas lembaga Ipal Komunal	39 Klpk	30,000,000	Pembinaan Pengelolaan Kelembagaan IPAL Komunal	Purbalingga	Peningkatan kapasitas kelembagaan Ipal Komunal	39 Klpk	30,000,000	Pendataan dan pembinaan lembaga Ipal Komunal
	Penyusunan Perbup Tindak Lanjut Implementasi UU Desa	Purbalingga	Tersusunnya Perbup tindak lanjut UU Desa	1 Perbup	15,000,000	Penyusunan Perbup Tindak Lanjut Implementasi UU Desa	Purbalingga	Tersusunnya Perbup tindak lanjut UU Desa	1 Perbup	15,000,000	Penyusunan Perbup

3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa				631,097,000	Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa				631,097,000	
	Gebrak Gotong Royong Masyarakat dan Bulkan Bhakti Gotong Royong	Purbalingga	Meningkatnya Kswadayaan	224 Desa	300,000,000	Gebrak Gotong Royong Masyarakat dan Bulkan Bhakti Gotong Royong	Purbalingga	Meningkatnya Kswadayaan	224 Desa	300,000,000	Adanya kenaikan target pencapaian Kinerja
	Fasilitasi Sarpras Lingkungan dan BP SPAM	Purbalingga	Terlaksananya fasilitasi Sarpras lingkungan dan BP SPAMS	50 Kelompok	100,000,000	Fasilitasi Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Sarana prasarana Lingkungan	Purbalingga	Terlaksananya fasilitasi Sarpras lingkungan dan BP SPAMS	50 Kelompok	100,000,000	Adanya kenaikan target pencapaian Kinerja
	Sistem Informasi Desa (SID)	Purbalingga	Terlaksananya Sistem Informasi Desa	552 orang	75,000,000	Sistem Informasi Desa (SID)	Purbalingga	Terlaksananya Sistem Informasi Desa	552 orang	75,000,000	Honorarium Tim Forum Data, Makan Minum Rapat, Intek baru, SPPD Dalam dan Luar Daerah, dan Sewa Gedung(tamb usulan bangun)
	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Purbalingga	Meningkatnya Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Ds	224 desa	50,122,000	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Purbalingga	Meningkatnya Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Ds	224 desa	50,122,000	Penambahan biaya perjalanan Dinas Dalam dan luar daerah , uang Saku peserta,sewa gedung dll
	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender (P2MBG)	Purbalingga	Meningkatnya pemberdayaan Sosial ekonomi	100 orang	40,975,000	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender (P2MBG)	Purbalingga	Meningkatnya pemberdayaan Sosial ekonomi	100 orang	40,975,000	Penambahan Perjalanan Dinas
	Pembinaan Kelembagaan Pengelolaan Pasar Desa	Purbalingga	Terwujudnya pengelolaan pasar desa sesuai peraturan	50 desa	35,000,000	Pembinaan Kelembagaan Pengelolaan Pasar Desa	Purbalingga	Terwujudnya pengelolaan pasar desa sesuai peraturan	50 desa	35,000,000	Adanya kenaikan target pencapaian kinerja
	Revitalisasi Kelembagaan Lumbung Desa	Purbalingga	Terwujudnya peningkatan Lumbung Desa	50 desa	30,000,000	Revitalisasi Kelembagaan Lumbung Desa	Purbalingga	Terwujudnya peningkatan Lumbung Desa	50 desa	30,000,000	Adanya kenaikan target pencapaian kinerja
			Jumlah		2,820,878,000					3,437,172,000	

2.5). Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Adapun kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik pemerintahan desa dan kelompok masyarakat yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga melalui beberapa kesempatan rapat dan koordinasi, Musrenbang Kecamatan maupun musrenbang Kabupaten akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan Program dan Kegiatan untuk Rencana Kerja tahun berjalan dengan mempertimbangkan prioritas Program dan Kegiatan guna pencapaian visi dan misi Kabupaten Purbalingga. Namun demikian mengingat dari hasil inventarisasi usulan dari desa mayoritas merupakan kegiatan fisik yang secara tupoksi bukan merupakan kewenangan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka usulan dimaksud diarahkan untuk dapat diusulkan pada OPD yang membidangi.

Adapun beberapa usulan tersebut dapat disajikan sebagaimana *tabel T.C 32* sebagai berikut :

Tabel T.C.32						
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018						
Kabupaten Purbalingga						
RENJA 2018						
Nama Perangkat Daerah : DINPERMASDES						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pengertian pembangunan Nasional menurut Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pada rencana awal RPJMN Tahun 2015 - 2019 yang dilakukan oleh pemerintah pusat dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA. Penguatan Pemerintah Desa tercantum dalam poin ketiga NAWACITA yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dimana salah satu strategisnya adalah dengan pembangunan Perdesaan.

Terkait penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pembangunan di Perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di desa dengan mendorong desa-desa agar lebih mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Keberhasilan pembangunan tingkat desa akan mendorong dan berimbas pada kemajuan dan keberhasilan Pembangunan Daerah. Sehingga dibutuhkan koordinasi antar pelaku pembangunan yaitu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan juga mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan sehingga mampu terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi

baik antar daerah, anatar ruang, antar waktu dan antar fungsi Pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan patrisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 mengacu pada review RENSTRA Dinpermasdes periode 2016 - 2021. Amanat yang dipahami dan semangat yang dibangun adalah untuk terus mempercepat pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan untuk kesejahteraan masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berakhlakul karimah.

Untuk mengimpelmentasikan strategi dirumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga diantaranya :

1. Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi perkantoran yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
2. Meningkatkan akses usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDES, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pasar Desa
3. Meningkatkan pembinaan sistem manajemen patrisipatif, pengembangan keswadayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan desa
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran
5. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan penyelenggaraan program dan kegiatan secara tepat waktu

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga disusun dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Masih perlunya meningkatkan penyelenggaraan pembinaan aparatur pemerintahan desa

2. Masih perlunya dorongan dan motivasi pengembangan ekonomi pedesaan melalui BUMDES, Pasar desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
3. Masih perlunya sosialisasi dan koordinasi tentang potensi sumber daya alam desa melalui Teknologi Tepat Guna (TTG)
4. Monitoring pelaksanaan Kegiatan Dana Desa
5. Meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat melalui Gebrak Gotong Royong
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan
7. Melaksanakan amanat undang-undang serta peraturan lainnya yang mengikat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan berpedoman pada RENSTRA Dinpermasdes 2016 - 2021, maka rencana dan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2018 terdiri Belanja Tidak Langsung yang memuat anggaran untuk kebutuhan pembayaran gaji dan Tunjangan tambahan penghasilan pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari 3 Program dan 31 Kegiatan yang terdiri dari :

A. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

Program ini merupakan program rutin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga bertujuan untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari :

1. Rapat –rapat Koordinasi dan Kosultasi Rp. 218.660.000,
2. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran Rp. 122.500.000,-
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Rp. 207.167.000,
4. Pengadaan sarana dan prasarana kantor Rp. 70.731.000,
5. Pendidkan dan Pelatihan pegawai Rp. 15.000.000,-
6. Penyusunan dokumen perencanaan dan LK SKPD Rp. 8.000.000,-

B. Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa, terdiri dari :

1. Fasilitasi DD dan ADD

Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Fasilitasi DD dan ADD adalah tersalurkannya Alokasi Dana Desa bagi 224 desa. Kegiatan

yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan monitoring. Dan rencana kebutuhan dana sebesar Rp 165.000.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

2. Diklat Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa.

Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Diklat manajemen administrasi pemerintahan desa adalah terlaksananya diklat bagi kades dan anggota BPD sebanyak 31 peserta, dengan pagu anggaran Rp. 240.206.000,- yang bersumber dari APBD Kab. Purbalingga.

3. Fasilitasi dan Pembinaan BUMDes.

Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini adalah berupa pelatihan dan monitoring bagi 50 BUMDES. Rencana anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

4. Pemanfaatan dan Pengenalan TTG.

Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan pemanfaatan dan pengenalan TTG adalah pelatihan bagi 4 kelompok. Rencana anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga

5. Fasilitasi TMMD

Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Fasilitasi TMMD adalah pelaksanaan TMMD di 4 desa yang dipilih. Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk upacara pembukaan/penutupan TMMD, rapat koordinasi teknis, monitoring pelaksanaan. Rencana kebutuhan dana sebesar Rp. 120.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

Indikator yang ditetapkan adalah untuk memberikan pembekalan kepada aparatur pemerintahan desa untuk 224 perangkat desa. Rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- bersumber dari APBD Kab. Purbalingga.

7. Fasilitasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini adalah pelatihan tentang pengelolaan Keuangan di desa menggunakan aplikasi bagi 224 desa yang belum melakukan pelatihan Siskeudes. Rencana anggaran sebesar Rp 100.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

8. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yakni terpilihnya pemenang lomba desa sedangkan sasarannya adalah pemerintahan desa dengan target kinerja sebanyak 3 desa sebagai pemenang. Rencana Kebutuhan dana sebesar Rp. 80.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

9. Fasilitasi Pokjanal Posyandu

Indikator kinerja yang ditetapkan yakni terpilihnya pemenang Posyandu terbaik desa untuk tingkat Kabupaten sejumlah 3 desa pemenang dan sekaligus pembinaan kepada pokjanal posyandu di masing-masing kecamatan. Rencana anggaran sebesar Rp. 62.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

10. Penyelenggaraan Musrenbangdes

Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini adalah sebagai sarana untuk menerima masukan dari masyarakat untuk Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga. Musrenbang dilaksanakan di 18 Kecamatan dan 224 desa. Rencana anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

11. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Indikator yang ditetapkan adalah memfasilitasi pembangunan kawasan sebanyak 2 kawasan dengan anggaran 50.000.000,-

12. Bupati Tilik Desa.

Indikator yang ditetapkan adalah meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa melalui pembinaan dan monitoring pimpinan daerah terkait pelaksanaan program program

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maupun pemberdayaan kelembagaan desa dengan anggaran Rp. 42.000.000,- dengan sasaran 6 Desa.

13. Fasilitasi Laboratorium Lapang Desa (Labsite) PMD

Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini adalah adanya 3 desa sebagai *pilot project labsite*. Rencana anggaran sebesar Rp.40.000.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

14. Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus.

Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini berupa verifikasi, asistensi, dan monitoring bagi 50 desa penerima bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Rencana anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

15. Penyusunan Laporan profil Desa se-Kabupaten purbalingga.

Indikator kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini adalah 224 desa mampu membuat profil desa. Kegiatan tersebut berupa pelatihan pembuatan profil desa. Rencana anggaran sebesar Rp 27.925.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

16. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa .

Indikator kinerja yang ditetapkan yakni terlaksananya kerjasama antar desa pada 18 kecamatan di kabupaten purbalingga. Dengan Rencana anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

17. Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan (LKMD/LKMK, RT/RW dan lembaga lainnya)

Indikator Kinerja yang ditetapkan yaitu berupa pelatihan untuk 104 orang dari perwakilan lembaga kemasyarakatan untuk meningkatkan kapasitas lembaga. Rencana anggaran sebesar Rp. 20.592.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

18. Penyusunan Perda/Perbup Tindak Lanjut Implementasi UU desa

Indikator Kinerja yang ditetapkan yaitu ditetapkannya peraturan bupati sebagai tindak lanjut diterbitkannya ketentuan terkait desa oleh pemerintah pusat sebanyak 1 perbub dan tersosialisasikannya kepada 224 desa. Rencana anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

C. Program Kelembagaan Masyarakat Desa.

1. Gebrak Gotong Royong Masyarakat dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini adalah pencaangan BBGRM di satu desa yang ditunjuk dan pelaksanaan Gebrak Gotong royong masyarakat di 224 desa yang melibatkan unsur pemerintah daerah, masyarakat, desa dan para pemangku kepentingan lainnya. Rencana anggaran sebesar Rp.300.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

2. Fasilitasi Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Sarana Prasarana Lingkungan.

Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini berupa monitoring dan evaluasi bagi 40 desa, 66 BP SPAMS dan 39 Kelompok IPAL komunal di desa. Rencana anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

3. Sistem Informasi Desa (SID).

Indikator kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini yaitu pelatihan berbasis teknologi informasi bagi 224 desa. Rencana anggaran sebesar Rp 75.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah

4. Fasilitasi KPMD.

Indikator yang ditetapkan kegiatan ini adalah pelatihan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa sebanyak 224 desa dengan anggaran Rp. 50.122.000,- yang bersumber dari Kabupaten Purbalingga.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender (P2MBG).

Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini berupa pelatihan kepada 100 orang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Rencana anggaran sebesar Rp. 40.975.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

6. Pembinaan kelembagaan pengelola pasar Desa.
Indikator kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini yaitu monitoring dan evaluasi terhadap 34 Pasar desa sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Rencana anggaran sebesar Rp.35.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.
7. Fasilitasi Kelembagaan Lumbung Desa.
Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini yaitu evaluasi dan monitoring 50 kelompok lumbung desa sebagai pelaksana ketahanan pangan di desa. Rencana anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

Adapun rumusan program dan kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju tahun 2019 OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat disajikan sebagaimana Tabel *T.C. 33* sebagai berikut :

Tabel TC-33
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju tahun 2019
 Kabupaten Putbalingga

Nama OPD : DINPERMASDES												
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2018			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.07.2.07.01.01	Program Penguatan Kelembagaan											
	Perangkat Daerah											
		1 Prosentase temuan pengelo laan anggaran yg ditindak lanjuti.		100 prosen								
		2 Rata rata capaian SKP										
		3 Indeks Kepuasan Masy.										
.01	Penyediaan bahan dan Jasa Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan operasional adminstrasi perkantoran	Purbalingga	Honorarium Bel Habis Pakai Bel Jasa Kantor	35 12 12	OB Bln Bln	218,660,000	APBD Honor PTT 1 Org/12 bln, Honor Pe ngelola keu/keg, atk, fc, listrik, tilp, air, internet, lembur, gas, makmin	Honorarium Bel Habis Pakai Bel Jasa Kantor	35 12 12	Org Bln Bln	240,526,000
.02	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi	Purbalingga	Perj. DD Perj LD	230 100	OH OH	122,500,000	APBD Pemenuhan kebutuhan koordinasi ke dalam daerah, und dan koordi nasi dg pemprov dan ke pusat.	Perj. DD Perj LD	230 100	OH OH	134,750,000
.03	Pemeliharaan sarana dan Prasa rana kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Purbalingga	Pemel Gedung Pemel Kend Pemel Alat ktr Pemel Mebelair Pemel Tanaman	1 17 15 20 12	unit unit unit unit Bln	207,167,000	APBD Pemel gedung, kend, peralatan kantor mebelair, internet, jaringan air, tilp listrik	Pemel Gedung Pemel Kend Pemel Alat ktr Pemel Mebelair Pemel Tanaman	1 17 15 20 12	unit unit unit unit Bln	227,883,700
.04	Pengadaan sarana dan Prasarana kantor	Tersedianya sarana dan Prasarana Kantor	Purbalingga	Almari arsip kursi rapat printer korden kamera kursi tunggu dispenser vacum cleaner almari buku	4 20 4 1 1 2 1 1 1	unit bh bh paket bh bh bh bh bh	70,731,000	APBD Pengadaan sarpras kantor berupa almari arsip, kursi rapat, printer, korden dan kamera	Almari arsip kursi rapat printer korden kamera kursi tunggu dispenser vacum cleaner almari buku	4 20 4 1 1 2 1 1 1	unit bh bh paket bh bh bh bh bh	77,804,100
.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Terlaksananya diklat bagi pegawai	Purbalingga		8	Org	15,000,000	APBD pengiriman peserta kursus, diklat 8 orang	Peserta	8	Org	16,500,000
.06	Penyusunan Dokumen Perencana an dan Laporan Kinerja OPD	Tersusunnya Dokumen Lapo ran Kinerja	Purbalingga	laporan kinerja	30	buku	8,000,000	APBD Penyusunan dokumen renja, lkjip, lkd, lkpj, perjanjian kinerja, RKT	laporan kinerja	30	buku	8,800,000

.07	Fasilitasi Sistem Keuangan Desa	Terlaksanana Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Purbalingga	Desa yg terfasilitasi SID	224	desa	100,000,000	APBD	Akomodasi dari BPKP, Makan minum rapat, SPPD Dalam dan luar Daerah, menyesuaikan indek, sewa gedung dan Honorarium Satgas SISKUDES	Desa yg terfasilitasi SID	224	desa	110,000,000
.08	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksanana Evaluasi pemberdayaan masy desa	Purbalingga	Desa terseleksi sbg pemenang	6	Ds/Kel	80,000,000	APBD	Operasional evaluasi penilaian, pembinaan desa terpilih, pengiriman ke tingkat propinsi.	Desa terseleksi sbg pemenang	6	Ds/Kel	88,000,000
.09	Fasilitasi Pokjanal Posyandu	Terlaksananya Fasilitasi Pokjanal Posyandu	Purbalingga	Posyandu yang terbina	224	desa	62,000,000	APBD	Pembinaan Kelembagaan Posyandu Se Kabupaten Purbalingga	Posyandu yang terbina	224	desa	68,200,000
.10	Penyelenggaraan Musrenbang Desa	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan Desa	Purbalingga	Desa yg melaksanakan musrenbang	224	desa	55,000,000	APBD	Sosialisasi, pemantauan/pendampingan, evaluasi dan monev. nyesuaian indek dan sewa gedung	Desa yg melaksanakan musrenbang	224	desa	60,500,000
11	Fasilitasi Pengembangan Kawasan	Tersusunnya dokumen pengembangan Kawasan	Purbalingga	Dokumen kawasan	2	kawasan	50,000,000	APBD	Mendongkrak perekonomian desa dg pembinaan dan pembuatan dok regulasi.	Dokumen kawasan	3	kawasan	55,000,000
12	Bupati Tilik Desa	Terkordinasinya Pemda Kab dengan Pemdes	Purbalingga	lokasi kegiatan bupati tilik desa	7	desa	42,000,000	APBD	Monitoring penyelenggaraan pemerintah	lokasi kegiatan bupati tilik desa	8	desa	46,200,000
13	Fasilitasi Laboratorium Iapang Desa (Labsite)	Terlaksananya Kegiatan di Desa Replikasi Labsite	Purbalingga	lokasi kegiatan labsite	3	desa	40,000,000	APBD		lokasi kegiatan labsite	4	desa	44,000,000
14	Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus	Peningkatan akuntabilitas keuangan Pemdes	Purbalingga	Desa Penerima program BKK dan bantuan gubernur	224	desa	30,000,000	APBD	Sosialisasi, pendampingan, evaluasi dan monev desa penerima BKK, baik dari APBD Kab maupun Bankeu dari Pemprov Jateng	Desa Penerima program BKK	224	desa	33,000,000
15	Penyusunan Laporan Profil Desa se Kab. Purbalingga	Tersusunnya Laporan Profil Desa se Kab. Purbalingga	Purbalingga	Laporan profil desa dan kelurahan	224	Desa	27,925,000	APBD	Operasional bintek dan pendampingan pengisian SIM Profil desa dg hasil dok profil desa	Laporan profil desa dan kelurahan	224	Desa	30,717,500
16	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Peningkatan kerja sama antar Desa	Purbalingga	Dokumen kerja sama antar desa	3	Desa	25,000,000	APBD	Mendorong terbentuknya kerjasama antar desa dalam satu kawasan dg potensi masing-masing untuk memacu percepatan perkembangan desa	Dokumen kerja sama antar desa	3	Desa	27,500,000
17	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan (LKMD/LKMK, RT/RW dan LK lainnya)	Peningkatan kapasitas SDM lembaga RT/RW	Purbalingga	Lembaga RT/RW yg dibina	224	desa	20,592,000	APBD	Peningkatan kapasitas pengurus RT RW se Kab. (mendukung capaian indikator kinerja program RPJM)	Lembaga RT/RW yg dibina	224	desa	22,651,200
18	Penyusunan Perbup Tindak Lanjut Implementasi UU Desa	Tersusunnya Perbup tindak lanjut UU Desa	Purbalingga	Dokumen laporan perbup	2	perbup	20,000,000	APBD	Penyesuaian regulasi yg terkait tindak lanjut UU Desa	Dokumen laporan perbup	2	perbup	22,000,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINPERMASDES TAHUN 2018

Rencana Kerja dan Sumber Pendanaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dapat disajikan sebagaimana Tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1							
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018							
Kabupaten Purbalingga							
Nama Perangkat Daerah : DINPERMASDES							
Kode	Urusan/Bidang		Indikator	Rencana Tahun 2018			
	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Program /Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2		3	4	5	6	7
2	07	01	01	Program Penguatan Kelembagaan			
				Perangkat Daerah			
07	01	01	01	Penyediaan bahan dan Jasa Perkantoran	Tertindaknya belanja barang dan jasa perkantoran	Purbalingga	31 Pegawai 218,660,000 APBD
07	01	01	02	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tertindaknya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Purbalingga	31 Pegawai 122,500,000 APBD
07	01	01	03	Pemeliharaan sarana dan Prasarana kantor	Tertindaknya sarana dan prasarana kantor	Purbalingga	1paket/Thn 207,167,000 APBD
07	01	01	05	Pengadaan sarana dan Prasarana kantor	Tertindaknya sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan	Purbalingga	1paket/Thn 70,731,000 APBD
07	01	01	07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Tertindaknya Diklat Teknis Pelayanan Prima	Purbalingga	31 Pegawai 15,000,000 APBD
07	01	01	08	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Tertindaknya Buku Renstra Dinpermasdes Kab. Purbalingga	Purbalingga	5 laporan 8,000,000 APBD 30 buku

2	07	01	15	Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa					
07	01	15	01	Fasilitasi DD dan ADD	Terlaksananya Fasilitasi ADD dan DD	Purbalingga	224 Desa	165,000,000	APBD
07	01	15	02	Diklat Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Diklat Kepala Desa Baru	Purbalingga	50 Kepala desa	240,206,000	APBD
07	01	15	03	Fasilitasi dan Pembinaan BUMDES	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas Pelaku BUMDes	Purbalingga	50 Unit	200,000,000	APBD
07	01	15	04	Pemanfaatan dan Pengenalan TTG	Termanfaatkannya TTG Sederhana Bagi Masyarakat	Purbalingga	3 Kelompok	120,000,000	APBD
07	01	15	05	Fasilitasi TMMD	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan TMMD di desa	Purbalingga	4 Desa	120,000,000	APBD
07	01	15	06	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Terlaksananya BinteK bagi Aparat Pemerintah Desa dan Sosialisasi bagi Anggota BPD	Purbalingga	224 desa	100,000,000	APBD
07	01	15	07	Pelatihan Sistem Keuangan Desa	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Keuangan di Desa	Purbalingga	224 desa	100,000,000	APBD
07	01	15	08	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Evaluasi pemberdayaan Masyarakat Desa	Purbalingga	3 desa	80,000,000	APBD
07	01	15	09	Fasilitasi Pokjnal Posyandu	Meningkatnya Kinerja Pokjnal Posyandu Kab dan Posyandu Desa/Kel	Purbalingga	239 Desa/Kelurahan	62,000,000	APBD
07	01	15	10	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Desa	Tersusunnya Dokumen RKP Desa Tahun 2018	Purbalingga	224 desa	55,000,000	APBD
07	01	15	11	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan	Purbalingga	2 Kawasan	50,000,000	APBD
07	01	15	12	Bupati Tilik Desa	Terlaksananya Kegiatan Bupati Tilik Desa	Purbalingga	6 Desa	42,000,000	APBD
07	01	15	13	Fasilitasi Laboratorium lapang Desa (Labsite)	Terlaksananya Pembinaan Desa Replikasi Labsite	Purbalingga	3 Desa	40,000,000	APBD
07	01	15	14	Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus	Purbalingga	50 Desa	30,000,000	APBD
07	01	15	15	Penyusunan Laporan Profil Desa se Kab.Purbalingga	Terkoordinasikannya Penyusunan Profil Desa	Purbalingga	224 Desa	27,925,000	APBD
07	01	15	16	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Purbalingga	18 Kecamatan	25,000,000	APBD
07	01	15	17	Pelatihan Lembaga kemasyarakatan (LKMD/LKMK, RT/RW dan LK lainnya)	Terealisasikannya Tugas dan Fungsi LKMD/LKMK	Purbalingga	120 Orang	20,592,000	APBD
07	01	15	18	Penyusunan Perbup Tindak Lanjut Implementasi UU Desa	Tersusunnya Peraturan Bupati	Purbalingga	1 Paket	20,000,000	APBD

2	07	01	16	Program Kelembagaan Masyarakat Desa					
07	01	16	01	Gebrak Gotong Royong Masyarakat dan Bulkan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Terwujudnya Semangat Gotong Royong Masyarakat	Purbalingga	224 Desa	300,000,000	APBD
07	01	16	02	Fasilitasi Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Sarana prasarana Lingkungan	Terfasilitasinya Keg LEM dan Penataan Sarpraslingkungan Pengelolaan BP SPAMS dan Pengelola IPAL Komunal di Desa Lokasi	Purbalingga	40 Desa	150,000,000	APBD
07	01	16	03	Sistem Informasi Desa (SID)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Informasi Desa	Purbalingga	18 Desa	75,000,000	APBD
07	01	16	04	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi KPMD Bagi Desa	Purbalingga	224 desa	50,122,000	APBD
07	01	16	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender (P2MBG)	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Bantuan Peralatan	Purbalingga	100 orang	40,975,000	APBD
07	01	16	06	Pembinaan Kelembagaan Pengelolaan Pasar Desa	Terlatihnya Pengelola Pasar Desa	Purbalingga	50 Desa	35,000,000	APBD
07	01	16	07	Revitalisasi Kelembagaan Lumbung Desa	Terwujudnya Revitalisasi Lumbung Desa	Purbalingga	50 Desa	30,000,000	APBD
					JUMLAH			2,820,878,000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat OPD, sebagai wujud nyata dan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan daerah. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menampung aspirasi atau masukan-masukan dari berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis partisipatif masyarakat, dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka menciptakan *Good Governance* sesuai dengan paradigma pembangunan saat ini. Dimana pada gilirannya akan mampu menciptakan sebuah kebijakan yang lebih efektif, efisien dan ekonomis (3 E) yang memiliki dampak lebih besar kepada masyarakat. Dengan demikian kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam program dan kegiatan dapat dirasakan masyarakat, khususnya oleh masyarakat pedesaan maupun masyarakat pada umumnya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga selain menjadi acuan pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun anggaran 2018, berfungsi pula sebagai sarana dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga sesuai dengan kemampuan sumber daya maupun kemampuan anggaran yang tersedia.

Rencana kerja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa yang akan datang oleh para pimpinan dan seluruh staf OPD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga, sehingga akan memperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya sangat kami harapkan, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Purbalingga.

Demikian Rencana Kinerja (RENJA) ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018, semoga bisa memberikan manfaat berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Plt. KEPALA DINPERMASDES
KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. WIDIYONO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610213 199503 1 001

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapermasdes

Analisis Kinerja Pelayanan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga. Hasil pengukuran dimaksud merupakan hasil penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome)

Hasil perhitungan dalam pengukuran kinerja keuangan dari alokasi dana kabupaten diperoleh nilai rata-rata capaian 84,96%. Nilai capaian tertinggi sebesar 100 % diperoleh pada kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor, Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD, Penyusunan laporan Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten, Pembinaan lembaga kemasyarakatan, Fasilitasi LATSITARDA ke 35, dan Pembinaan KPP USRI Pasca Program, sedangkan capaian terendah sebesar 16,88% diperoleh pada kegiatan Fasilitasi pembinaan kelembagaan pasca PNPM MPd, Integrasi dan MP3KI. Penyerapan sebesar 16,88% hal tersebut digunakan untuk rapat sosialisasi LKM dan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sedangkan fasilitasi pembentukan LKM yang berbadan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 belum dapat dilaksanakan sehingga UPK yang ada baru bertransformasi ke BUMADES BERSAMA

Adapun hasil Analisis Kinerja Pelayanan tiap-tiap kegiatan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga, yaitu sebagai berikut :

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapermasdes.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2011 Tanggal 3 Januari 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purbalingga serta kondisi yang ada maka dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas ada beberapa isu-isu penting yang antara lain :

1. Relatif Tingginya Angka Kemiskinan di Purbalingga;
2. Belum terintegrasinya Perencanaan Partisipatif kedalam mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Rendahnya modal sosial akibat semakin lunturnya nilai budaya dan adat istiadat masyarakat;
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan TTG dalam pengelolaan SDA secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Rendahnya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam menggerakkan perekonomian di Desa (produk, pasar, kemitraan)

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan dokumen perencanaan berupa Renja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan pada tingkat SKPD sudah melalui proses pelibatan masyarakat secara luas, yaitu dengan melakukan inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/ kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui proses musrenbang. Penyusunan Renja SKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2016 diupayakan sinergis dan sinkron dengan kebijakan pemerintah melalui 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pro poor, pro job, pro growt dan pro environment.

Adapun hasil dari proses yang dilakukan dalam rangka membandingkan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, yaitu sebagai berikut :

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil dari proses yang dilakukan dalam rangka membandingkan rancangan awal dengan analisis kebutuhan usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan diperoleh hasil sebagai berikut :

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tujuan perencanaan pembangunan nasional antara lain adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintah, maupun antar pusat dan daerah.

Untuk penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan pada tingkat SKPD harus mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RKPD Kabupaten. Oleh karena itu RKPD Kabupaten disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pada tingkat nasional, provinsi, maupun dokumen perencanaan tingkat Kabupaten yang sudah ada.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bapermasdes

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

a. Tujuan

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Terciptanya keserasian pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah (inequility region)
3. Meningkatnya kualitas, penguasaan dan pemanfaatan TTG dan meningkatnya kemandirian masyarakat.

b. Sasaran

1. Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa agar dapat menjadi penggerak pembangunan daerah dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

2. Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan pengembangan ekonomi keluarga.
3. Tercapainya peningkatan dan pemerataan pendapatan perkapita riil masyarakat serta menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

3.3. Program dan Kegiatan

a. Program :

Agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai maka Bapermasdes Kabupaten Purbalingga maka telah ditetapkan Program Kerja tahun 2016 sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah.
2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Masyarakat
3. Program Pemberdayaan Sosial ekonomi Masyarakat.

b. Kegiatan :

1. Penyediaan bahan dan jasa perkantoran.
2. Rapat kordinasi dan konsultasi
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana
4. Pengadaan sarana prasarana kantor
5. Pendidikan dan pelatihan pegawai
6. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD
7. Fasilitasi ADD
8. Fasilitasi TMMD
9. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
10. Pemanfaatan dan pengenalan TTG
11. Fasilitasi Labolatorium Lapang Desa (Lab Site) PMD
12. Penyusunan laporan Profil Desa dan Kelurahan se Kabupaten Purbalingga
13. Fasilitasi Pokjanal Posyandu
14. Pelatihan lembaga kemasyarakatan (LKMD/LKMK,RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya)
15. Fasilitasi Dana Desa
16. Penyusunan perda/ perbub tindak lanjut implementasi UU Desa
17. Fasilitasi Bantuan keuangan Desa Berdikari

18. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Desa Tahun 2017
19. Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
20. Revitalisasi Kelembagaan Lumbung Desa
21. Pembinaan Kelembagaan Pengelolaan Pasar Desa
22. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten Purbalingga
23. P2MBG
24. Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Pamsimas
25. Fasilitasi Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Sarana Prasarana Lingkungan

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2015 dan prakiran maju Tahun 2016 sebagaimana dibawah ini :

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja ini dibuat sebagai dokumen SKPD Bapermasdes Kabupaten Purbalingga untuk rencana penyelenggaraan Pembangunan tahun 2016. Dokumen perencanaan pembangunan ini memiliki kedudukan yang sangat penting, karena arah penyelenggaraan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan dapat diprediksikan bagaimana kondisi masyarakat untuk masa yang akan datang.

Rencana kerja Tahun 2016 ini disusun dalam upaya meningkatkan dan mendorong kinerja aparat Bapermasdes agar lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran, program dan kegiatan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara internal maupun secara eksternal, yaitu dengan melibatkan SKPD lain. Harapan kami hal ini bukan hanya sebagai dokumen untuk Bapermasdes saja namun betul-betul menjadi milik seluruh masyarakat kabupaten purbalingga. Oleh karena itu dukungan dari seluruh masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga sadaya masyarakat lainnya sangat kami harapkan.

Sekian terimakasih.

Purbalingga, Januari 2016
Pit. KEPALA BAPERMASDES
KABUPATEN PURBALINGGA

R. IMAM WAHYUDI, SH, MSI

Pembina Utama Muda

NIP. 19630418 198903 1 006